

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG: DARI ASPEK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Rita Martini^{1*}, Fildzah Rahmah Satirah², Nurhasanah³, Kartini binti Che Ibrahim⁴,
Kartika Rachman Sari⁵, Farida Husin⁶

^{1,2,3,5,6} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

⁴ Departemen Perdagangan, Politeknik Mukah, Sarawak, Malaysia

*Email: fildzah983@gmail.com

Abstrak

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah adalah sistem pengendalian internal (SPI). Kajian ini bertujuan mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekratriat Daerah Kota Palembang. Pengolahan data berasal dari pengumpulan jawaban responden atas kuesioner yang disebar. Responden meliputi staf yang ada di dua belas bagian pada Sekretariat Daerah Kota Palembang. Terkumpul enam puluh jawaban responden yang mengembalikan. Metode analisis yang diterapkan adalah regresi linier. Hasil kajian menyimpulkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Kata kunci: akuntansi pemerintahan, informasi keuangan, pengendalian internal,

Abstract

The internal control system is one of the variables that can help to improve the quality of government financial statement data (SPI). The purpose of this study is to see how the internal control mechanism at Palembang City's Regional Secretariat affects the quality of financial reports. The responses to the distributed questionnaires are collected, and data processing begins. Staff from the Palembang City Regional Secretariat's twelve sectors were polled. Sixty people responded to the survey, and sixty of them provided feedback. Linear regression was used as an analytical tool. The study's findings show that internal control has a favorable and significant impact on financial statement information quality.

Keywords: financial information, government accounting, internal control

1. PENDAHULUAN

Pernyataan SAP No.1 menjelaskan laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan merupakan salah satu faktor yang menggambarkan kinerja suatu daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Informasi yang berkualitas adalah informasi yang mempunyai keakurasian, kecepatan dan kesesuaian dengan kebutuhan manajemen dan kelengkapan dari informasi yang dihasilkan (Susanto dalam Syaifullah, 2010). Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan

keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki keuangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan SPI sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu yang dijalankan oleh orang-orang dari setiap jenjang organisasi yang diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan antara pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi (Mulyadi, 2013: 180). Pengendalian internal merupakan sistem/prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Pengendalian internal berisi rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Martini, et al., 2019). Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

SPIP terdiri atas beberapa unsur, pertama, lingkungan pengendalian. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya. Aktivitas tersebut melalui penegakan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Unsur pengendalian intern yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan dan lainnya di seluruh Instansi Pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.

Pemantauan SPI dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidu, dan pengujian efektivitas SPI yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

Laporan keuangan adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dari pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya. Laporan keuangan pemerintah bermanfaat memberikan informasi bagi *stakeholder* yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai serta pemakai mempercayai informasi tersebut. Informasi keuangan harus bermanfaat bagi pemakai sama seperti informasi tersebut harus mempunyai nilai (Suwarjono: 2014). Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah yaitu menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Data BPK menunjukkan permasalahan masih didominasi oleh lemahnya SPI pada pemerintah pusat atau daerah (Martini, et al, 2019). Masih begitu banyak ditemukan ketidakpatuhan karyawan atau manajer dalam SPI yang ada pada perusahaan atau pemerintah daerah. Begitu pula dengan pengelolaan keuangan daerah yang masih sangat kurang. Hal ini menjadikan kualitas laporan keuangan juga menurun serta dapat juga memberikan dampak pada keandalan dan ketepatan waktu terhadap laporan keuangan (Martini, et al, 2019). Masih banyak kejanggalan yang terjadi pada saat auditor dan BPK memeriksa sebuah laporan keuangan sebuah perusahaan atau pada pemerintah daerah (Atmaja & Probohudono, 2015). Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis: SPI berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Palembang.

2. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang yang terdiri dari 12 bagian. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang mempunyai tanggungjawab kerja dan terlibat secara langsung dalam membuat laporan keuangan (Sugiyono, 2016:218). Dimana keseluruhan sampel yang diambil adalah sebanyak 5

responden yang terdiri dari Kepala Bagian, 3 Kepala Sub Bagian, Bendahara Pembantu dikali 12 bagian di Sekretariat Daerah Kota Palembang yaitu 60 responden yang diberikan kuesioner penelitian.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah SPI (X). SPI yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019: 69). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala interval karena terdapat ukuran skala dari 1 sampai 5. Sedangkan Teknik pengukurannya adalah teknik *Summated Rating Method: Likert Scale* atau *Skala Likert*.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Regresi Linear Sederhana untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen dan dependen. Dilakukan terlebih dahulu pengujian kualitas data dengan uji validitas, reliabilitas, dan uji t.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Hasil pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai probabilitas (*p value*) residual dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,200. Hal ini berarti bahwa data residual terdistribusi secara normal. Nilai tolerance untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam model penelitian ini. Hasil uji heterikedasitas diperoleh tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai *absolut residual*. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0.05, sehingga menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier sederhana, untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel SPI terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil pengujian tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linier

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.960	2.971		.996	.323
	X	.123	.053	.145	2.346	.023

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2021.

Berdasarkan output SPSS, dapat diformulasikan model analisis data dalam penelitian ini melalui persamaan berikut:

$$Y = 2,960 + 0,145X_1 + e$$

Penjelasan dari persamaan di atas sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) pada persamaan ini bernilai sebesar 2,960 menjelaskan bahwa nilai rata-rata pada kualitas informasi laporan keuangan pada SPI konstan atau sama dengan 2,960.
2. Nilai Koefisien (b₁) sebesar 0,145

Model persamaan regresi ini memiliki nilai koefisien positif yaitu sebesar 0,145. Angka 0,145 artinya bahwa setiap peningkatan SPI maka akan terjadi kenaikan pada kualitas informasi laporan keuangan sebesar 0,145 dengan asumsi bahwa variabel independen lain nilainya tetap.

Hasil analisis dalam Tabel 2 menunjukkan seluruh item pertanyaan untuk variabel sistem pengendalian intern memiliki kriteria valid. Item-item kuesioner yang valid/layak akan digunakan sebagai instrument penelitian, karena r_{count} lebih besar jika dibandingkan dengan r_{table} .

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel SPI (X)

Item Pertanyaan	r_{count}	r_{table}	Keterangan
SPI1	0,935	0.254	valid
SPI2	0,955	0.254	valid
SPI3	0,955	0.254	valid
SPI4	0,853	0.254	valid
SPI5	0,970	0.254	valid
SPI6	0,970	0.254	valid
SPI7	0,970	0.254	valid
SPI8	0,947	0.254	valid
SPI9	0,803	0.254	valid

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2021.

Tabel 3 menunjukkan seluruh item pertanyaan untuk variabel kualitas informasi laporan keuangan memiliki kriteria valid. Item-item kuesioner yang valid/layak akan digunakan sebagai instrument penelitian, karena r_{count} lebih besar jika dibandingkan dengan r_{table} .

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

Item Pertanyaan	r_{count}	r_{table}	Keterangan
KILP1	0,759	0.254	valid
KILP2	0,880	0.254	valid
KILP3	0,814	0.254	valid
KILP4	0,847	0.254	valid
KILP5	0,843	0.254	valid
KILP6	0,895	0.254	valid
KILP7	0,798	0.254	valid

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2021.

Tabel 4 menggambarkan nilai *Crosbach's Alpha* masing-masing instrumen pertanyaan lebih dari 0,600. Sehingga keseluruhan pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel SPI berada pada tingkat reliabel yang baik.

Table 4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel SPI (X)

Item Pertanyaan	Cronbach's	Konstanta	Keterangan
-----------------	------------	-----------	------------

	Alpha		
SPI1	0,975	0.600	reliabel
SPI2	0,974	0.600	reliabel
SPI3	0,974	0.600	reliabel
SPI4	0,980	0.600	reliabel
SPI5	0,973	0.600	reliabel
SPI6	0,973	0.600	reliabel
SPI7	0,973	0.600	reliabel
SPI8	0,974	0.600	reliabel
SPI9	0,983	0.600	reliabel

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2021.

Tabel 5 dapat menunjukkan hasil pengujian terhadap sembilan pertanyaan yang digunakan dalam variabel kualitas informasi laporan keuangan (Y). Nilai *Crosbach's Alpha* masing-masing instrumen pertanyaan lebih dari 0,600. Sehingga keseluruhan pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel SPI berada pada tingkat reliabel yang baik.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

Item Pertanyaan	Cronbach's Alpha	Konstanta	Keterangan
KILP1	0,925	0.600	reliabel
KILP2	0,905	0.600	reliabel
KILP3	0,913	0.600	reliabel
KILP4	0,910	0.600	reliabel
KILP5	0,910	0.600	reliabel
KILP6	0,904	0.600	reliabel
KILP7	0,917	0.600	reliabel

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2021.

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pada Tabel 1 ditunjukkan nilai t_{hitung} dan derajat signifikansi tiap variabel X, yang merupakan indikator penerimaan dan penolakan hipotesis. Hasil pengujian hipotesis pada variabel independen (X) nilai t_{hitung} sebesar 2,346. Hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 2,003. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,346 > 2,003$) dengan nilai signifikan sebesar 0,023 maka nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau (sig) $0,023 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Independen SPI (X) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen kualitas informasi laporan keuangan (Y). Artinya dapat disimpulkan bahwa SPI berpengaruh signifikansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

3.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t_{count} variabel SPI senilai 2,346 lebih besar dari nilai t_{table} sebesar 2,003. Dengan hasil t_{count} yang diperoleh lebih besar dari nilai t_{table} sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel SPI berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Nilai signifikansi SPI adalah $0,023 < probabilitas$ 0,05. Hasil ini menunjukkan jika SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berarti hipotesis yaitu SPI diterima dan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Setda Kota Palembang.

SPIP merupakan sistem pengendalian di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diselenggarakan secara menyeluruh. SPIP ditujukan agar dapat memberikan

keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi. SPIP memiliki beberapa unsur untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan negara. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan melalui unsur-unsur SPI ini dengan melakukan langkah-langkah seperti penguatan pengawasan, pemisahan tupoksi yang jelas, pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah, pencatatan yang akurat dan tepat waktu serta melakukan pengujian sistem pengendalian intern yang sudah ada. Untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik, unsur-unsur tersebut harus berjalan baik. Dengan demikian, SPI (Martini, et al., 2019) merupakan pondasi *good governance* dan garis pertahanan pertama dalam melawan ketidakabsahan dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Semakin baik SPI maka akan semakin baik kualitas informasi laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan (Siti & Ismunawan, 2021) yang menyatakan SPI memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Penelitian ini juga memperkuat (I Putu & I Wayan, 2014) dan (Martini, et al, 2020) bahwa SPI berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Sekretariat Daerah Kota Palembang telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Penerapan kebijakan memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas guna SPI telah berjalan dengan baik. Hal ini bermakna bahwa dengan adanya SPI yang baik dalam suatu organisasi maka akan berdampak pada peningkatan kualitas informasi laporan keuangan. Peningkatan SPI berdampak pada meningkatnya kualitas informasi laporan keuangan pada Sekretariat Daerah kota Palembang yang menjadikan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

4. KESIMPULAN

SPI berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Palembang. Hal ini bermakna bahwa dengan adanya SPI yang baik dalam suatu organisasi maka akan berdampak pada peningkatan kualitas informasi laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harlinda. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau). Volume 11 , 127-144.
- Indra. (2017). Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 13(1), 1907-3011.
- Mahaputra, I. P., & Wayan, P. I. (2014). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 8.2, 230-244.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 108. Retrieved from <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa>.
- Martini, R., Agustin, R., & Sari, K. R. (2020). Accrual Discretion Policy on Excess/Less Budget Financing at the Provincial Level. *TEST Engineering & Management*, 82, 9925-9935.
- Martini, R., Sari, K. R., Somadi, T., & Karman, I. W. (2019). Financial Independence of the South Sumatra Regional Government” Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology 2019-Social Sciences Track (iCASTSS 2019). 354, pp. 360-364. Denpasar: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icastss-19.2019.75>.

- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 (2013). Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota.
- Qomah, S., & Ismunwan. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Trisakti*. Vol. 8, 95-108.